

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu tidak terkecuali salah satunya negara Indonesia. Pertumbuhan penduduk menjadi suatu hal yang cenderung terjadi dalam suatu perkembangan di perkotaan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati membuat negara yang memiliki luas wilayah 1.905 juta km² ini menjadi dikenal dengan negara agraris. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki tanah yang subur serta sumber daya alam yang melimpah, sektor yang memiliki peranan penting salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi dan peran yang sangat penting di negara Indonesia dimana dapat menjadi penopang perekonomian serta dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Negara Indonesia memiliki luas baku tanah sawah seluas 7,46 juta hektar pada tahun 2019. Sehingga penduduk Indonesia dapat hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil bercocok tanam.

Keberadaan sektor pertanian disuatu negara khususnya Indonesia memiliki nilai yang sangat penting dan krusial. Pertanian dinilai sebagai palang pintu untuk memenuhi dan menjaga ketahanan pangan negara. Peran pemerintah dalam membuat regulasi merupakan salah satu faktor terpenting seperti: Undang-undang ketahanan pangan, dan peraturan- peraturan yang berhubungan dengan sektor pertanian, menjaga ketahanan pangan serta pemberdayaan masyarakat

melalui program *Urban Farming*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengacu pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tersebut, usaha dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah dengan bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang beranekaragam yang dimiliki oleh setiap daerah di negara Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini memiliki andil yang sangat besar demi membuat dan menjaga keutuhan ketahanan pangan negara Indonesia. Pemerintah harus membuat perencanaan dan sebuah konsep yang sangat matang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berhubungan dengan fungsi ketahanan pangan nasional agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Bustanul Arifin (2005) dalam jurnal (Prabowo, 2010) mendefinisikan bahwa ketahanan pangan berarti tantangan yang dihadapi seluruh negara yang harus dijadikan sebagai prioritas demi mencapai kesejahteraan masyarakat di zaman yang semakin modern saat ini. Pastinya kebutuhan pangan di negara Indonesia sendiri akan mengalami peningkatan secara terus menerus jika melihat laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk yang terjadi di negara Indonesia bukan semata-mata permasalahan utama yang mengakibatkan

ketahanan pangan di negara tersebut akan mengalami ancaman. Disisi lain permasalahan kurangnya lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor yang akan membuat terguncangnya permasalahan ketahanan pangan nasional, dimana bisa dilihat dari banyaknya lahan pertanian yang dari waktu ke waktu dikonverensikan menjadi lahan pemukiman perumahan dan lahan industri. Sempitnya lahan pertanian serta berkurangnya ruangan terbuka hijau mengakibatkan sulitnya berharap kepada para petani untuk menggerakkan sektor pertanian secara optimal.

Pangan disuatu negara khususnya Indonesia memiliki arti dan peranan yang penting dimana hal tersebut juga berpengaruh dengan memberikan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pertanian menjadi sektor unggulan yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pertimbangan yang menjadikan bahwa sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang pertama, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah dan cocok sebagai pengembangan lahan pertanian. Kedua, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan sehingga mayoritas memiliki matapencaharian sebagai petani. Ketiga, sumber daya manusia dalam bidang pertanian yang cukup mumpuni sehingga dapat bekerja dengan baik untuk mengembangkan sektor pertanian. Keempat, apabila ketahanan pangan di Indonesia mengalami ancaman, dengan potensi sumber daya alam yang banyak dimiliki oleh Indonesia tidak mengharuskan untuk bergantung pada produk-produk pertanian luar negeri yang memiliki harga jual tinggi. Ketahanan pangan pada dasarnya harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi dan konsumsi.

Ketahanan pangan di Indonesia masih memberikan ruang ekonomi yang sangat luas bagi rakyat khususnya rakyat kecil dan menengah.

Sektor pertanian yang biasanya melekat dalam pikiran masyarakat adalah berkawasan disuatu pedesaan yang memiliki lahan kosong dan masih luas, tetapi hal tersebut tidak memungkiri bahwa sektor pertanian dapat berkembang di wilayah perkotaan juga. Sektor pertanian yang berkembang di wilayah perkotaan dibuktikan dengan adanya program “*Urbang Farming*”. Program *Urban Farming* merupakan aktifitas dalam bidang pertanian yang dilaksanakan pada wilayah perkotaan atau yang dapat disebut juga sebagai pertanian perkotaan. *Urban Farming* sendiri merupakan gerakan yang dicetuskan oleh Amerika Serikat dimana dimanfaatkan sebagai upaya penanggulangan buruknya situasi kondisi ekonomi di beberapa negara pada saat perang dunia yang mengakibatkan melonjaknya harga sayuran pada saat itu. Dalam implementasinya *Urban Farming* dibutuhkan keterampilan, keahlian dan inovasi dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang masih kosong. Pemanfaatan lahan kosong tersebut nantinya akan berdayaguna untuk menghasilkan bahan-bahan pokok yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menjaga keutuhan ketahanan pangan sehari-hari bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen utama guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam jurnal (Fauzi, Ichiniarsyah, &

Agustin, 2016) menjelaskan bahwa *Urban Farming* atau yang disebut juga pertanian perkotaan adalah kegiatan dan aktivitas pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan serta produk-produk lainnya melalui budidaya tanaman yang dilakukan secara intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya dengan menggunakan kembali sumber daya alam untuk memperoleh hasil panen. Implementasi program *Urban Farming* ini apabila dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek dan komponen lingkungan secara baik akan menghasilkan nilai positif yang berdampak tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga ekologi dan ekonomi perkotaan. Kota Surabaya yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat surabaya.liputan6.com:

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penduduk di Surabaya, Jawa Timur mencapai 3,15 juta pada 2019, atau naik sekitar 60 ribu jiwa dari periode 2018 sebesar 3,09 juta. Demikian disebutkan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya yang disajikan pada Surabaya dalam Angka 2020, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan pada Selasa (9/3/2020). BPS Surabaya juga mencatat kenaikan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,07 persen pada 2019 dari periode sama tahun sebelumnya 0,64 persen.

Sumber: (<https://surabaya.liputan6.com/read/4197865/data-surabaya-penduduk-kota-pahlawan-tembus-31-juta-pada-2019> diakses pada Selasa 05 Januari 2021, 09.01 WIB).

Permasalahan yang timbul dengan adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah bagaimana kemampuan kota Surabaya untuk menyediakan layanan, fasilitas kepada publik yang memadai sehingga seluruh kebutuhan publik terpenuhi. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kota Surabaya dihadapkan dengan permasalahan masyarakat yang menuntut pemerintah kota Surabaya untuk

bekerja keras menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai kota besar kota Surabaya tidak bisa menghindari persoalan ketahanan pangan serta terjadinya disorganisasi sosial, tentunya dengan banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap di kota Surabaya semakin membuat masyarakat tersebut terus menerus mencari peruntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jurnal (Junainah, Kanto, & Soenyono, 2016) menjelaskan bahwa perkembangan penduduk terjadi akibat arus urbanisasi yang pesat (*over urbanization*) dan arah dari perkembangan perkotaan yang hanya berpaku dan berfokus pada kemajuan ekonomi adalah awal mula munculnya persoalan di kota besar seperti Surabaya. Arus urbanisasi yang terus menerus terjadi di kota besar seperti Surabaya yang mana hal ini menimbulkan banyak permasalahan yang membawa dampak antara lain masalah pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kekurangan gizi, kepadatan penduduk.

Tabel 1. 1Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010- 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2010	195,7	7,07
2011	183,3	6,58
2012	175,7	6,25
2013	169,4	6
2014	164,4	5,79
2015	165,72	5,82
2016	161,01	5,63
2017	154,71	5,39
2018	140,81	4,88
2019	130,55	4,51

Sumber: Badan Pusat Statistik (<https://surabayakota.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sebanyak 195,7 orang atau sekitar 7,07 persen penduduk dalam keadaan miskin. Pada tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukkan angka penurunan jumlah penduduk miskin di kota Surabaya. Namun kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2015 yang menunjukkan angka 165,72 orang atau sekitar 5,82 persen mengalami kemiskinan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin terus menerus mengalami penurunan kembali. Dengan adanya kenaikan angka kemiskinan yang sempat terjadi pada tahun 2015, mengidentifikasi bahwa terdapat masalah persoalan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Sebaliknya dengan menurunnya angka kemiskinan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya mengalami perbaikan. Pelaksanaan program pertanian perkotaan atau *Urban Farming* ini dilatarbelakangi pada permasalahan-permasalahan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi tersebut sekaligus untuk meningkatkan fungsi ketahanan pangan, maka pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun program *Urban Farming* yang berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dimana implementasi program *Urban Farming* ini nantinya akan mewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras dan seimbang. Pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait harus memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi ekologis ruang terbuka hijau. Program *Urban Farming* di

Kota Surabaya merupakan sebuah upaya untuk memanfaatkan ruang dan lahan yang minimal untuk dimanfaatkan sebagai penghasilan produksi yang berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh seluruh pihak sebagai dampak dan konsekuensi semenjak Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia khususnya kota Surabaya. Dalam hal ini fasilitas bantuan untuk menunjang sistem produksi juga dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan yang terbebas dari Covid-19. Untuk tetap menjaga ketahanan pangan selalu terpenuhi saat pandemi Covid-19, pemerintah kota Surabaya merencanakan program-program yang akan diimplementasikan sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat republika.co.id:

“REPubLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Urban farming atau pertanian perkotaan banyak diminati warga Kota Surabaya, Jawa Timur, selama pandemi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Yuniarto Herlambang, di Surabaya, Selasa (14/7), mengatakan saat ini urban farming diminati warga dengan dibuktikan dalam tiap hari banyak permintaan bibit tanaman ke kantor DKPP kota Surabaya. "Kami terus memberikan pendampingan dan bantuan stimulan berupa bibit tanaman kepada warga yang berminat dalam budidaya tanaman melalui metode urban farming, baik itu berupa tanaman pangan maupun hortikultura,"

Bahkan, lanjut dia, pihaknya menyatakan setiap hari permintaan bibit tanaman ke kantor DKPP selalu ada, baik itu permintaan bibit perorangan maupun kelompok. Namun karena keterbatasan jumlah bibit, sehingga tidak semua permintaan itu difasilitasi.

"Kalau (permintaan) banyak mungkin kita survei dahulu, apakah cocok lahannya, tapi kalau sedikit pasti kita beri. Permintaan terus meningkat," katanya.

"Belum sampai akhir tahun 2020 permintaan bibit sudah sekitar 80 ribu. Yang paling banyak permintaan bibit sayuran dan toga. Kalau sayuran

seperti cabai, tomat, terong, okra. Kalau toga, aneka macam, mulai empon-empon," kata Herlambang

Menurut dia, di tengah pandemi saat ini program urban farming sangat cocok diterapkan, khususnya dalam upaya ketahanan pangan. Untuk itu, kata dia, DKPP Surabaya terus berperan aktif untuk mendorong dan membantu masyarakat dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan tersebut.

"Jadi kalau memang masyarakat membutuhkan benih atau bibit-bibit kita dukung itu. Permintaan bisa perorangan atau per kelompok. Kita juga lihat permintaannya (jumlah) bibit dengan kondisi di lapangan," ujarnya. Khusus bagi warga Surabaya yang ingin mengajukan bibit tanaman gratis bisa langsung datang ke kantor DKPP. Namun, kata Herlambang, untuk mendapatkan bibit tanaman itu, warga juga harus melengkapi beberapa persyaratan seperti mengisi formulir identitas dan formulir kesediaan untuk pemeliharaan tanaman. Selain itu, warga juga harus melengkapi dengan foto kopi identitas diri

"Itu kalau perorangan atau pengajuan bibit tidak dalam jumlah banyak, misal satu orang dengan lima bibit tanaman. Kalau kelompok atau lembaga bisa mengajukan surat permohonan. Biasanya petugas kami akan melakukan monitoring dahulu, kalau kelompok biasanya lebih dari 100 bibit," katanya.

Sumber: (https://republika.co.id/berita/daerah/jawa/urban-farming_diminati_warga-surabaya-saat-pandemi diakses pada Senin 26 Oktober 2020, 10.33 WIB)

Berdasarkan berita diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fokus dan perhatiannya kepada permasalahan ketahanan pangan pada saat menghadapi pandemi covid-19 saat ini. Untuk menghadapi keadaan saat ini dan sebagai wujud tanggap pada permasalahan pangan saat masa pandemi Covid-19 maka melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mengandalkan adanya program *Urban Farming*. Dijelaskan bahwa program *Urban Farming* pada saat pandemi Covid-19 diminati warga kota Surabaya. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya masyarakat melakukan banyak permintaan bibit tanaman ke kantor

dinas terkait untuk dibudidayakan dan ditanam. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya terus melakukan pengawasan serta pendampingan dan bantuan stimulan berupa bibit tanaman kepada kelompok masyarakat yang ingin menanam serta membudidayakan tanaman tersebut melalui metode *Urban Farming*.

Tabel 1. 2 Lokasi Kegiatan Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming)

No.	Wilayah	Kecamatan
1.	Surabaya Pusat	Kecamatan Bubutan Kecamatan Genteng Kecamatan Simokerto Kecamatan Tegalsari
2.	Surabaya Timur	Kecamatan Gubeng Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Rungkut Kecamatan Sukolilo Kecamatan Tambaksari Kecamatan Tenggiling Mejoyo
3.	Surabaya Barat	Kecamatan Asemrowo Kecamatan Benowo Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Pakal Kecamatan Sambikerep Kecamatan Sukomanunggal Kecamatan Tandes
4.	Surabaya Selatan	Kecamatan Dukuh Pakis Kecamatan Gayungan Kecamatan Jambangan Kecamatan Karangpilang Kecamatan Sawahan Kecamatan Wiyung Kecamatan Wonocolo Kecamatan Wonokromo

Sumber: Sihgiyanti, Vika Jessy, Evaluasi Implementasi Program *Urban Farming* oleh Dinas Pertanian di Kota Surabaya: 2016

Dalam jurnal (Sihgiyanti, 2016) menjelaskan bahwa program *Urban Farming* diimplementasikan berpatokan pada tujuan program ini ialah sektor

pertanian perkotaan mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan pokok dan gizi masyarakat pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Dalam tabel 1.2 diatas memberikan gambaran bahwa program *Urban Farming* telah dikembangkan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memaparkan bahwa sesuai arahan wilayah yang dipilih menjadi sebagai implementasi program *Urban Farming* pada masa pandemi Covid-19 yaitu meliputi pemanfaatan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya. Lokasinya meliputi pinggiran kota Surabaya yaitu rusun, bantaran sungai hingga Bekas Tanah Kas Desa (BTKD). Beberapa titik lokasi BTKD yang ditanami antara lain BTKD Jambangan, persil 12 BTKD Kelurahan Kebraon, BTKD Menanggal Timur, BTKD Kelurahan Jeruk, BTKD Kebraon dan BTKD Sumber Rejo serta untuk Tanah Instansi Pemerintah terdapat 7 lahan.

Gambar 1. 1 Panen Raya di BTKD Kelurahan Jeruk



(Sumber: <https://jatimnet.com/lahan-btkd-jeruk-panen-ketela-rambat-madu>)

Salah wilayah yang dipilih sebagai tempat penanaman *Urban Farming* pada masa pandemi Covid-19 saat ini ialah BTKD Kelurahan Jeruk Kecamatan

Lakarsantri Kota Surabaya. Kelurahan Jeruk merupakan salah satu wilayah yang mengimplementasikan program *Urban Farming* pada masa pandemi Covid-19. Program *Urban Farming* di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri ini diberdayakan oleh kelompok tani yang berada di wilayah tersebut sebagaimana yang terdapat pada pemberitaan yang dimuat oleh surabayapagi.com:

SURABAYAPAGI, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya panen raya di lahan bekas tanah kas desa (BTKD) Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Rabu (23/9/2020). Saat itu, ia mencabut satu persatu Ketela Rambat Madu itu dan sesekali dibantu langsung oleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan bahwa lahan BTKD Kelurahan Jeruk ini luasnya sekitar 7,6 hektar. Di sini, banyak tanaman dan buah-buahan se nusantara ditanam di tempat BTKD ini, termasuk pula tanaman langka seperti pohon dewandaru dan beberapa tanaman lainnya.

“Jadi, ini nanti akan kita jadikan pusat Agrowisata disamping tempat pembelajaran warga kalau ingin belajar menanam yang benar. Makanya di tempat ini juga ada waduk yang diberi bibit lele, ada pula lahan untuk menanam padi dan jagung serta tanaman pangan lainnya. Jadi, ini memang menjadi salah satu tempat percontohan ketahanan pangan di Surabaya,” kata dia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Yuniarto Herlambang memastikan bahwa pihaknya terus gencar melakukan penanaman berbagai bahan pangan di 24 lokasi, jenisnya pun bermacam-macam. Khusus di BTKD Kelurahan Jeruk ini, ia mengaku masih menggarap sekitar sepertiganya dari luas lahan 7,6 hektar.

Herlambang memastikan bahwa lahan luas itu akan terus dikembangkan pengelolaannya, apalagi saat ini Dinas PU Bina Marga dan Pematuan terus meletakkan tanah urugnya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk itu, sehingga itu sangat membantu DKPP dalam mengembangkan lahan yang nantinya akan dibuat Agrowisata itu.

“Jadi, ke depannya ini akan terus kita kembangkan, karena ini percontohan juga, apalagi Bu Wali tadi sudah menyampaikan bahwa ini akan dijadikan Agrowisata, sehingga nanti kita juga kembangkan ternak di sini. Nanti ternak kambing, ayam petelor dan sebagainya. Hasilnya nanti akan diberikan kepada warga yang membutuhkan, seperti panen Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon ini nanti akan diberikan kepada warga yang kurang mampu, karena ini memang untuk ketahanan pangan di Surabaya,” pungkasnya.

Sumber: (<http://surabayapagi.com/read/surabaya-bisa-swadaya-pangan-sendiri> diakses pada Senin 26 Oktober 2020, 11.34 WIB)

Berdasarkan pemberitaan diatas dapat diketahui bahwa BTKD Kelurahan Jeruk ini menjadi salah satu lahan yang dipilih dalam mewujudkan program *Urban Farming* pada masa pandemi Covid-19. Disisi lain nantinya BTKD Kelurahan Jeruk juga direncanakan akan dijadikan sebagai pusat agrowisata maka dari itu program *Urban Farming* yang diimplementasikan di BTKD Kelurahan Jeruk ini dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat cara menanam yang benar apalagi pada saat pandemi covid-19 dan nantinya akan terus dikembangkan. Kelompok tani yang ada di Kelurahan Jeruk ini berada dibawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, sehingga apabila kelompok tani yang berada di wilayah tersebut membutuhkan bantuan akan ditinjau langsung oleh dinas terkait. BTKD Kelurahan Jeruk ini mengembangkan program *Urban Farming* dengan penanaman padi, jagung, ketela rambat madu, tanaman langka seperti pohon dewandaru serta terdapat waduk yang diberi bibit lele. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menggarap sekitar sepertiganya dari luas lahan 7,6 hektar di BTKD Kelurahan Jeruk ini.

Perkembangan teknologi pertanian pada saat keadaan pandemi Covid-19 saat ini perlu untuk dilakukan walaupun dengan pemanfaatan lahan yang tidak terlalu luas salah satunya di BTKD Kelurahan Jeruk. Konsep menanam yang lebih kearah modern dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah tersebut dengan Implementasi Program *Urban Farming* di BTKD Kelurahan Jeruk nantinya diharapkan dapat menjadi program yang diunggulkan

karena dapat menghasilkan serta menyuplai bahan-bahan hasil pertanian yang berkualitas sehingga dapat diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat dengan nilai gizi yang baik. Implementasi program *Urban Farming* di BTKD Kelurahan Jeruk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk terus berkreasi dalam bertani guna menciptakan kemandirian pangan dan juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada saat pandemi Covid-19.

Dalam implementasi program *Urban Farming* partisipasi masyarakat yang khususnya berada di wilayah Kelurahan Jeruk sangatlah dibutuhkan karena masyarakatlah yang memiliki peran penting sehingga nantinya kebutuhan pangan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 dapat terpenuhi. Dalam buku (Anggara, 2018) Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan apabila ingin mencapai keberhasilan implementasi yaitu tujuan kebijakan dengan standar yang jelas, sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional, karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana, lingkungan politik, sosial dan ekonomi serta disposisi. BTKD Kelurahan Jeruk yang dipilih sebagai salah satu lokasi *Urban Farming* nantinya akan berusaha dalam menunjang dan menciptakan pemenuhan kebutuhan pangan yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah tersebut dan juga tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM “*URBAN FARMING*” SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN**

PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KELURAHAN JERUK KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA)”

1.2 Rumusan Masalah

BTKD Kelurahan Jeruk merupakan salah satu wilayah yang lahannya dimanfaatkan sebagai implementasi program *Urban Farming* pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat di latar belakang, perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi program *Urban Farming* di BTKD Kelurahan Jeruk sebagai langkah upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana Implementasi Program “*Urban Farming*” Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi penulis. Sebagai bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam penelitian sejenis dimasa yang akan serta menjadi acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi di Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya terutama berkaitan dengan Implementasi Program *Urban Farming* Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi BTKD Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta gambaran kepada BTKD Kelurahan Jeruk untuk meninjau dan menindaklanjuti implementasi program *Urban Farming* pada masa pandemi Covid-19 sehingga nantinya menunjukkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuannya sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tersebut.